

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian pemerintah agar dapat mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar supaya laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern dalam suatu organisasi perusahaan, lembaga organisasi profit maupun nonprofit mutlak menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya (Novtania. 2017)

Pengendalian *intern* dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah senantiasa menghadapi masalah yang kompleks, permasalahan yang paling umum terjadi ialah

korupsi, kesalahan administrasi serta pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik.

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi bagi para pengguna yang berkepentingan (weygant, et.al, 2007). Informasi akuntansi disajikan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak berkepentingan. Menurut Harahap (2010) bahwa laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Jika informasi disajikan dengan benar informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan akan bermanfaat bagi pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Namun ada juga laporan keuangan yang tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jika terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan menyebabkan informasi yang signifikan dan sulit dipahami (Dewi, 2014).

Salah satu perangkat yang dapat menghasilkan informasi laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal. Menurut (Mihaela, 2010) pengendalian Internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah di ikuti. Pengendalian internal yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi, berguna bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan-kecurangan, dan mengamankan kekayaan perusahaan. (Muliyanto (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. (Renaldo (2016) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal memiliki lima komponen, yaitu:

1. lingkungan pengendalian,
2. penilaian risiko
3. aktivitas pengendalian,
4. informasi dan komunikasi,
5. pemantauan.

Agar struktur pengendalian internal berfungsi dengan baik, diperlukan penerapan kelima komponen tersebut. struktur pengendalian internal yang memadai mengalami kekeliruan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih

diandalkan.(Kiranayanti, 2016).kompetensi sumber daya manusia juga sangat berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Desi (2008) dalam Dewi (2014) kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan sistem akuntansi sangat mempengaruhi informasi laporan keuangan. Permasalahan dalam penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, namun bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, dan yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi, pilihan 3 akuntansi, dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan dalam melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan dibidang akuntansi.

Fungsi sistem akuntansi Dalam buku Sistem Informasi Akuntansi pada Aplikasi Administrasi Bisnis Mirza Maulinarhadi dan Max Advian Noor (2013), dijelaskan beberapa fungsi sistem akuntansi pada organisasi atau perusahaan, yaitu:

- (1) Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas serta transaksi.
- (2) Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- (3) Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.
- (4) Sub sistem sistem akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan.

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan.

Setiap manajemen dalam sebuah organisasi memerlukan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya. Sebuah informasi didalam laporan keuangan sangat bermanfaat bagi penggunanya, Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas baik, maka suatu organisasi harus mempunyai sistem informasi yang baik pula.

Sistem informasi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan disebut dengan sistem informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang baik disajikan dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Bagian yang bersangkutan seperti bagian akuntansi di tuntut untuk dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Apabila semua faktor telah dipertimbangkan maka manajemen mempunyai resiko dan kesalahan yang relatif kecil terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Alasan tersebut didasari oleh penelitian yang dilakukan (Untary, dkk (2015) bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Namun pada penelitian Saputra (2015) bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI)

seperti terkait dalam pasal 56 ayat (4) UU Nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap SKPD selaku pengguna anggaran atau pengguna barang memberikan pernyataan atas pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standart akuntansi pemerintah. Peran sistem pengendalian internal untuk meningkatkan kinerja transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atau kepercayaan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang ada. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk mengatur teknik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi, prosedur pencatatan, dokumen, formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi, laporan dan pengawasan. Fungsi pengendalian internal tersebut juga dapat membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan dan hak-hak dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, sistem pengendalian intern (SPI) yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (BPK, 2012). Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Faishol (2016)

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Namun pada penelitian Yendrawati (2013) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Selain Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Teknologi sendiri di pandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya (Nurillah, 2014). Pemanfaatan teknologi informasi mempermudah pemerintahan daerah untuk menyusun LKPD, selain itu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu. Dengan pemanfaatan teknologi itu sendiri memiliki banyak manfaat untuk mejadikan laporan keuangan tersebut akan menjadi lebih baik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 sendiri merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Mutiana, dkk (2017) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun pada penelitian Riandani (2017) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas

sebuah laporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia. Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan dari disiplin ilmu akuntansi, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan orang yang berkompeten dalam bidang akuntansi. Oleh karena itu, Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan sebuah laporan keuangan tersebut berkualitas atau tidak. Kompetensi itu sendiri adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005 dalam Indriasari 2008). Kompetensi juga merupakan dasar bagi seseorang untuk mencapai kinerja tertinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sementara sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Begitu pula pada entitas pemerintahan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan daerah (LKPD) yang berkualitas dan baik maka di butuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan berkompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah dan juga organisasional tentang pemerintahan agar penyusunan laporan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan

tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Menurut Diamond (2002) penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dikatakan sudah berkualitas apabila (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) LKPD mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat Lima opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas

(WTP-DDP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Luky Primadita (2020) Berdasarkan observasi awal yang peneliti laksanakan terhadap beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di ruang lingkup pemerintah kota sungai penuh terdapat beberapa fenomena dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat penyusunan laporan keuangan yang belum tertata dengan rapih, hal ini dapat dilihat masih banyaknya perbaikan-perbaikan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD dan masih adanya kelemahan penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut hal ini terlihat dari sering terlambatnya pelaporan laporan keuangan.
2. Dapat dilihat dari hasil pemantauan LSM tentang akses laporan keuangan yang tidak diketahui secara luas. Sehingga sulitnya LSM dan masyarakat untuk mengakses tentang laporan keuangan yang dikelola oleh setiap OPD dikota Sungai Penuh.
3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan oleh sebagian OPD yang ada di Kota Sungai Penuh.
4. Dalam penyusunan laporan keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdapat pada OPD pemerintah kota sungai penuh.

5. Serta masih rendahnya pengawasan terhadap pemeriksaan laporan keuangan yang ada pada OPD pemerintah kota sungai penuh.

Dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan badan keuangan daerah Kota Sungai Penuh
2. Apakah terdapat pengaruh sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan badan keuangan daerah Kota Sungai Penuh
3. Apakah Terdapat Pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan badan keuangan daerah Kota Sungai Penuh
4. Berapa Besar Pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan badan keuangan daerah Kota Sungai Penuh.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan badan keuangan daerah Kota Sungai Penuh
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan badan keuangan daerah Kota Sungai Penuh
3. Untuk mengetahui Pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan badan keuangan daerah Kota Sungai Penuh
4. Untuk mengetahui Berapa Besar Pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan badan keuangan daerah Kota Sungai Penuh

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan sekaligus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama menajalani perkuliahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci (STIE-SAK).
2. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang dapat menarik perhatian untuk meneliti dibidang kajian yang sama di waktu yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi daerah Kota Sungai Penuh dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Berguna untuk menambah pengetahuan sehubungan dengan mengembangkan ilmu mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh

